

# PRODUKTIVITAS PERTANIAN DAN INVOLUSI KESEJAHTERAAN PETANI (Studi Kasus di Meunasah Pinto Aceh Utara)

## *Agricultural Productivity and Farmers Welfare Involution (Case Study in Meunasah Pinto Aceh Utara)*

Nirzalin\*), dan Nulwita Maliati

Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Malikussaleh  
Lhokseumawe, Aceh, Indonesia

<sup>\*)</sup>E-mail: nirzalinarmia@yahoo.co.id

### **ABSTRACT**

*Abundant rice productivity as a result of the success of the modernization of the system, pattern of production and use of seeds are carried by the Indonesian government in agriculture was not automatically change the level of farmers welfare. Based on studies in meunasah Pinto North Aceh District, this article is going to show that the issue of farmers' welfare is a complex issue strands. At the empirical level narrow land ownership, capital dependence on the elite village economy, changes in the production system of reciprocity into a wage complex obstacles to change farmers' welfare. In fact, this modernization not only exposes farmers to the issue of involution wellbeing but also directly contribute to the flourishing of social segregation in society as in Meunasah Pinto, North Aceh. As a result, the social insurance obtained by citizens when agricultural production systems is reciprocity now after changing the wage system of social insurance is gone. The high individuality as a new mode of social life also requires farmers to adapt to the problems of their lives increasingly problematic in the midst of well-being that low.*

*Keywords: Farmers, Welfare, modernization of production systems, Meunasah Pinto, North Aceh*

### **ABSTRAK**

Produksi pertanian yang melimpah sebagai konsekuensi dari keberhasilan modernisasi sistem, pola produksi dan penggunaan bibit unggul tidak secara otomatis dapat mengubah tingkat kesejahteraan petani. Berdasarkan studi di Meunasah Pinto Kabupaten Aceh Utara. Artikel ini hendak menunjukkan kompleksitas persoalan kesejahteraan petani. Dalam tataran empiris, sempitnya lahan, ketergantungan modal pada elite ekonomi desa dan pergeseran sistem reproduksi dalam sistem produksi sebagai akibat dari modernisasi sistem pertanian merupakan hambatan-hambatan mendasar terhadap perubahan kesejahteraan petani. Realitasnya, modernisasi sistem pertanian tidak hanya berakhir pada terjadinya involusi kesejahteraan petani tetapi juga berkontribusi langsung pada terjadinya segregasi sosial pada masyarakat petani Meunasah Pinto, Aceh Utara. Implikasinya, asuransi sosial yang terjalin melalui sistem reproduksi pada pelbagai aspek kehidupan termasuk pada sistem produksi pertanian kini hilang. Modernisasi yang diikuti dengan rasionalisasi dalam pola hubungan produksi menyebabkan pola hubungan produksi tradisional yang bersifat komunal dan reproduksi berubah menjadi serba upah dan individual. Gaya hidup individual ini menghadapkan para petani pada pelbagai persoalan dalam kehidupan mereka.

Kata kunci: Kesejahteraan petani, modernisasi sistem produksi, Meunasah Pinto, Aceh Utara

### **PENDAHULUAN**

Pertanian merupakan soko guru bagi perekonomian bangsa Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan Indonesia sebagai negara agraris. Maka, hubungan antara sektor pertanian dengan pembangunan nasional dan kesejahteraan petani merupakan hubungan yang bersifat timbal balik. Sebab, kesejahteraan masyarakat Indonesia pada dasarnya terletak pada hasil yang diperoleh dari hasil bertani. Hasil pertanian yang melimpah dimungkinkan hanya apabila lahan pertanian yang dimiliki mencukupi. Namun, dalam tataran empiris, meskipun Indonesia merupakan negara agraris, hasil Susenas bulan September 2012 menunjukkan sebagian besar rumah tangga miskin adalah rumah tangga pertanian yaitu sebesar 48,8 persen. Hal ini terkait dengan pendapatan petani dan buruh tani yang rendah dibandingkan upah di sektor lainnya. Upah buruh tani perhari pada tahun 2012 sebesar Rp. 40,302, lebih rendah jika dibandingkan upah buruh bangunan yaitu sebesar Rp. 65.148,-. Besarnya jumlah rumah tangga usaha pertanian di Indonesia, tidak sebanding dengan tingkat usahanya. Hal

ini terlihat dari penguasaan lahan pertanian oleh petani di Indonesia yang relatif kecil atau identik dengan petani gurem yang didefinisikan sebagai rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan yang menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar. Pada tahun 2013, jumlah rumah tangga petani gurem di Indonesia mencapai 14,25 juta atau 55,33 persen dari jumlah rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan (Kementerian PPN/BAPPENAS, 2014). Mereka tidak memiliki lahan yang cukup luas untuk mampu menghasilkan pendapatan sesuai kebutuhan hidupnya. Sejatinnya realitas tersebut tidak perlu terjadi, jika pelbagai kebijakan politik pembangunan pertanian diarahkan pada peningkatan kesejahteraan petani. Secara empiris, perwujudan kesejahteraan Indonesia dapat dilakukan melalui pembangunan ekonomi dan industri berbasis pertanian. Hal ini merupakan pilihan tepat, sebab sebagai negara agraris sumber daya alam dan sumberdaya manusiacukup tersedia. Tambahan pula, tradisi bertani dikalangan masyarakat Indonesia merupakan tradisi yang sudah mengakar. Pemerintah tinggal membangun infrastruktur yang memadai, teknologi dan industri yang tepat guna serta pemasaran hasil pertanian yang kompetitif

(Lumbanraja, 2010).

Terobosan pembangunan pertanian di Indonesia antara lain dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan Revolusi Hijau. Namun, kebijakan ini tidak cukup sukses. Kegagalan kebijakan Revolusi Hijau antara lain dipicu oleh pelaksanaannya yang bersifat terlalu mengedepankan pemerintah sebagai pusat kebijakan dan peningkatan produksi sebagai panglima. Perubahan di pedesaan akibat modernisasi pertanian (Revolusi Hijau) ini tercermin pada statusnya tingkat kesejahteraan masyarakatnya (Mardiyansih, 2010).

“Pendekatan mata pencaharian” telah menjadi populer dalam perdebatan mengenai pengentasan kemiskinan di Indonesia selama satu dekade terakhir. Profesor Ellis telah menerbitkan sejumlah artikel dan makalah tentang mata pencaharian dan diversifikasi selama beberapa tahun terakhir (Ellis, 2000). Sistem penghidupan (*livelihood system*) adalah kumpulan dari strategi nafkah yang dibentuk oleh individu, kelompok maupun masyarakat di suatu lokalitas (Dharmawan, 2007).

Diskusi tentang hubungan tingkat produksi dan kesejahteraan petani di Indonesia, menarik pula dibahas Aceh didalamnya. Pada kenyataannya, Aceh merupakan wilayah Indonesia yang memiliki lahan pertanian cukup luas. Sehingga jika dikelola dengan baik dapat mendukung kesejahteraan masyarakatnya. Kesuburan tanah, dukungan iklim dan kegigihan petaninya menjadi modal kunci dalam mewujudkan swasembada pertanian di daerah ini. Jika di daerah lain di Indonesia seperti di Jawa tenaga kerja disektor pertanian mengalami kemerosotan di Aceh relatif tidak menjadi soal, sebab bertani merupakan pekerjaan dan sumber nafkah yang mentradisi. Tradisi bertani di daerah ini dipertahankan melalui pola pewarisan secara turun-temurun. Realitas ini, membentuk kebudayaan bertani di Aceh sehingga menjadi fondasi ekonomi dalam menjalani kehidupan. Kuatnya hubungan orang Aceh dengan pertanian tampak nyata dalam produktivitas hasil pertanian yang meningkat signifikan dari tahun ke tahun seperti yang tercermin pada FSVA (*Food Security and Vulnerability Atlas*) Aceh 2010.

Studi, FSVA (*Food Security and Vulnerability Atlas*) 2010 menunjukkan bahwa dari sisi ketersediaan pangan, produksi padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar meningkat, pada umumnya daerah di Aceh merupakan daerah swasembada/surplus pangan dalam hal produksi sereal. Produksi padi pada tingkat kabupaten di Aceh selama 8 tahun terakhir (2002-2009) menunjukkan bahwa produksi tersebut mengalami peningkatan terutama pada 11 kabupaten, yaitu di Kabupaten Simeulue, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, Bireuen, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Nagan Raya, dan Aceh Jaya.

Produksi pertanian yang tinggi di Aceh Utara tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan para petani. Hasil Sensus Pertanian 2013 menunjukkan bahwa produksi padi tertinggi di Provinsi Aceh dihasilkan di wilayah Kabupaten Aceh Utara, yaitu sebesar 277.749 ton padi atau sebesar 14,19% dari seluruh produksi padi di Aceh (1.956.939 ton) yang ditanam pada lahan seluas 69.286 hektar (17,41% dari total luas tanam padi di Provinsi Aceh) dengan produktivitas padi sebesar 4,80 ton per hektar (BPS Aceh, 2017). Akan tetapi, berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan Komposit yang digunakan untuk memetakan 251 kecamatan yang memiliki data lengkap untuk 9 indikator terkait kerawanan pangan kronis, ditemukan bahwa di antara 251 kecamatan tersebut gampoeng-gampoeng (desa) yang ada di Kabupaten Aceh Utara tergolong rentan pangan. Tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan terutama disebabkan

karena tingginya angka kemiskinan yang mencapai 20 % di wilayah ini (BPS: 2013). Menyadari realitas tersebut, maka pemerintah Aceh mengembangkan berbagai program yang dapat membantu masyarakat, khususnya komunitas petani di pedesaan untuk dapat mengatasi dan mengantisipasi berbagai persoalan yang berkaitan dengan produksi, ketersediaan, dan akses terhadap pangan.

Program-program tersebut, gencar dilakukan pemerintah salah satunya di gampoeng Meunasah Pinto, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara. Namun, program-program pemerintah tersebut meskipun berhasil meningkatkan produktivitas pertanian namun relatif gagal dalam meningkatkan kesejahteraan petani disana. Realitas ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, utamanya untuk memahami mengapa petani tidak mengalami perubahan kesejahteraan ditengah-tengah meningkatnya hasil panen mereka. Jika sebelum menggunakan teknologi pertanian yang diintroduksi oleh pemerintah, hasil panen yang diperoleh petani sebesar 2 ton per hektar, maka dengan menggunakan teknologi pertanian seperti bibit unggul, pupuk dan obat pemberantas hama, maka rata-rata hasil panen petani bisa mencapai 7 ton per hektar<sup>1</sup>

Eksistensi petani dalam menjalani dinamika kehidupannya dapat dilihat dengan beberapa perspektif. Menurut Scott (1976), petani susah menerima perubahan, sebab mereka lebih mengutamakan selamat (*safety first*) dan takut pada resiko (*risk averse*). Petani sulit mengubah cara bertaninya karena dengan perubahan itu dapat mengancam subsistensinya. Begitu pula dalam merespon perubahan kelembagaan, misalnya dengan kehadiran koperasi di pedesaan, petani kecil sulit terlibat agar hubungannya dengan patron tidak terputus, berhubung keamanan subsistensinya dipelihara oleh patron. Memutuskan hubungan dengan patron berarti menciptakan kerawanan subsistensial.

Perspektif berbeda diutarakan oleh Popkin (1975). Menurut Popkin, petani pada dasarnya berperilaku rasional, mereka tidak sepenuhnya bergantung pada moral kolektivitas desa. Bila mereka berhubungan dengan pasar, terdapat kemampuan untuk melakukan adaptasi, sehingga perilaku ekonominya bisa kondusif dengan prinsip ekonomi pasar, seperti dilakukannya tindakan menabung, investasi, dan cari laba. Asumsi tentang hubungan patron-klien dan kegotong-royongan yang menciptakan harmoni dan jaminan subsistensi komunitas desa dianggapnya terlalu romantik.

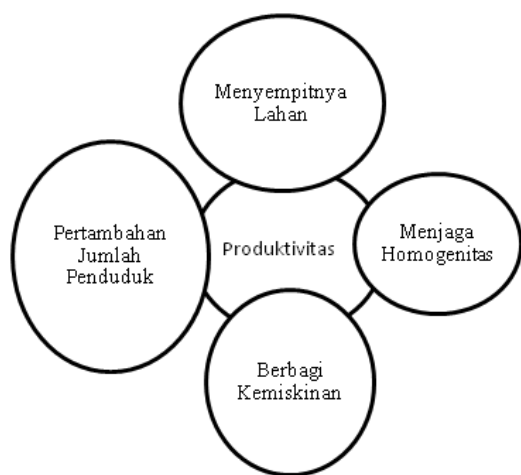
Teori pilihan rasional yang dipelopori oleh James S. Coleman mengusulkan sebuah analisis tindakan kolektif yang bahkan dapat diperluas ke dalam analisis, seperti norma sosial, *marriage markets*, sistem status, dan pencapaian tingkat pendidikan. Untuk merumuskan definisi pilihan rasional dalam sosiologi, fokus studi diarahkan pada penjelasan fenomena sosial makro berdasarkan pilihan yang dibuat aktor sosial pada tingkat mikro. Pemusatan perhatiannya pada tindakan rasional individu ini dilanjutkan dengan memusatkan perhatian pada masalah hubungan mikro-makro atau bagaimana cara gabungan tindakan individual menimbulkan perilaku sistem sosial. Selanjutnya, Coleman juga memperhatikan hubungan sebaliknya, yaitu hubungan makro-mikro atau bagaimana sistem memaksa orientasi aktor (Haryanto, 2012).

Meskipun teori pilihan rasional fokus pada para aktor yang mempunyai tujuan dari pilihan tindakan mereka, namun pilihan itu harus memperhitungkan setidaknya dua pembatas utama pada tindakan itu. Yang pertama adalah kelangkaan sumberdaya. Para aktor mempunyai sumberdaya yang berbeda-beda. Wawancara dengan Ramli Ketua Kelompok Tani Gampoeng Meunasah Pinto, 13 Juni 2016

dan juga akses yang berbeda kepada sumberdaya lainnya. Bagi yang menguasai sumberdaya, pencapaian tujuan menjadi lebih mudah. Sumber pembatas kedua adalah lembaga-lembaga sosial yang memberikan sanksi positif dan negatif yang membantu mendorong tindakan-tindakan tertentu dan menghalangi untuk melakukan tindakan yang lain (Ritzer, 2014).

Struktur sosial desa persawahan sebelum revolusi hijau umumnya berciri homogen. Berlaku nilai kesederhanaan dan kebersamaan dalam pranata yang pro-homogenik. Saat tekanan penduduk meningkat pada sebuah desa, sehingga homogenitas mengarah pada diferensiasi, komunitas akan menempuh ekspansi statis (*static expansion*) agar homogenitas tetap terpelihara (Boeke dalam Salman, 2012). Peremukiman dan pertanian baru dibuka secukupnya untuk memenuhi subsistensi, dan bila komunitas baru itu telah terisi penuh karena penambahan populasi, maka ekspansi statis serupa akan berulang. Dengan pola itu, lahan baru yang dibuka selalu terbatas, sekedar mencukupi hidup sederhana bagi kelebihan populasi, dan batas daya dukung cepat tercapai setiap kali tekanan penduduk mendesak. Maka, desa persawahan dengan cepat terpenyusut persebaran komunitas yang masing-masing berstruktur homogenik.

Setelah ekspansi statis memenuhi desa, sementara penduduk terus bertambah, adaptasi untuk memelihara homogenitas diarahkan ke dinamika internal desa. Geertz (1963) menemukan bahwa dengan penduduk yang terus bertambah dan sumberdaya yang terbatas, masyarakat desa bukannya terbelah atas tuan tanah dan petani tak bertanah, melainkan mempertahankan homogenitasnya dengan cara membagi-bagikan kue ekonomi yang ada, sehingga bagian yang diperoleh masing-masing makin lama makin sedikit. Fenomena itulah yang disebutnya sebagai proses “berbagi kemiskinan” (*shared poverty*).



Gambar 1. *Shared Of Poverty* Clifford Geertz

Berbagi kemiskinan demi lestari homogenitas merupakan implikasi lebih jauh dari nilai pro-kesederhanaan dan pro-kebersamaan yang dianut warga desa. Budidaya padi sawah sebagai inti kebudayaan, dibiarkan menampung sejumlah pencari nafkah yang terus bertambah, sehingga struktur dan kultur yang tercipta semakin kompleks ke dalam. Akibatnya, meski dari segi produksi persatuan luas desa persawahan terlihat makin produktif, tetapi bila diukur per jumlah orang yang berkontribusi dalam produksi itu, sebenarnya peningkatan produksi tidak nyata tercapai. Telah berlangsung involusi pertanian (*Agricultural Involution*) (Geertz, 1963): ibarat orang berenang, tangan dan kaki memang terkapak serta air riuh terkapak, tetapi posisi tidak berpindah (Salman, 2012).

Berbagi kemiskinan dan involusi pertanian selain merupakan akibat dari nilai pro-kesederhanaan dan pro-kebersamaan juga dapat dilihat sebagai respons atas dinamika perubahan. Ia merupakan pilihan sadar akan strategi adaptasi terhadap tekanan penduduk yang ditempuh petani dalam keniscayaan memelihara homogenitas. Perspektif Geertz di Indonesia nampaknya masih relevan. Namun, perlu dipertanyakan apakah statis (involusi) nya kesejahteraan petani di Indonesia hanya disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk sehingga menyempitkan lahan produksi semata.

Disisi lain, perspektif *livelihood* (mata pencaharian) menawarkan lensa penting untuk melihat pertanyaan pembangunan pedesaan yang kompleks. Pendekatan mata pencaharian yang berkelanjutan telah mendorong refleksi yang lebih dalam dan kritis. Hal ini timbul terutama dari melihat konsekuensi dari upaya pembangunan dari perspektif tingkat lokal, yang membuat hubungan dari tingkat mikro, menjadi ciri khas mata pencaharian orang miskin terhadap perampasan kelembagaan dan kebijakan yang lebih luas di tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan bahkan tingkat internasional. Oleh karena itu, refleksi semacam itu memberi keyakinan yang tajam tentang pentingnya pengaturan kelembagaan dan tata kelola yang kompleks, dan hubungan kunci antara mata pencaharian, kekuasaan dan politik (Scoones, 2009). Kemiskinan petani tetap terjadi meskipun produktivitas meningkat dapat dipicu pula oleh realitas lainnya yang diantaranya hubungan kekuasaan petani dengan elite desa yang menguasai modal aktivitas pertanian mereka

### Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berusaha melukiskan peristiwa, memahami dan menangkap makna budaya dibalik stagnasinya kesejahteraan petani meskipun produktivitas pertaniannya meningkat. Pemahaman ini dibangun dari sudut pandang dan penghayatan petani sendiri. Sebab itu, perspektif yang digunakan dalam memahami fenomena dalam studi ini adalah perspektif etnografi.

Metode etnografi yang digunakan dalam studi ini adalah metode etnografi kognitif sebagaimana yang dikonstruksikan oleh Spradley. Berbeda dengan etnografi modern yang memandang bentuk sosial dan budaya (pemahaman) masyarakat dibangun dan dideskripsikan melalui analisis dan nalar sang peneliti. Maka, dalam etnografi kognitif bentuk tersebut dianggap merupakan susunan yang ada dalam pikiran (*mind*) anggota masyarakat tersebut dan tugas sang peneliti adalah menggali agar keluar dari pikiran mereka. Untuk menggali suatu pemahaman sosial yang ada dipikiran suatu komunitas, maka seorang peneliti etnografi harus memahami simbolisasi pikiran mereka itu dari bahasa yang mereka ungkapkan baik implisit maupun eksplisit, baik melalui perkataan dalam komentar sederhana maupun dalam wawancara yang panjang (James P. Spradley, 2006: xii).

Objektivitas dalam perspektif metode ini dibangun atas rumusan tentang situasi tertentu sebagaimana yang dihayati oleh individu atau kelompok sosial tertentu (Moleong, 2000) yang dalam penelitian ini adalah kelompok masyarakat petani Aceh Utara Propinsi Aceh. Proses penghayatan ini penting dilakukan sebab apa yang tampak dipermukaan sebagai pola tindakan manusia merupakan pancaran dari apa yang ada dalam pikiran manusia itu (Sanapiah Faisal, 2003). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam (*Indepth Interview*), *Focus Group Discussion* (FGD) dan studi dokumen.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Potret Geografis dan Sosial-Budaya Orang Meunasah Pinto

Meunasah Pinto, adalah sebuah *gampoeng* (desa) yang indah dan sejuk yang terletak di Kecamatan Muara Batu Kabuapten Aceh Utara Propinsi Aceh. *Gampoeng* ini, merupakan *gampoeng* agraris yang terbentang di daerah percampuran antara perbukitan dan dataran yang landai dengan luas mencapai 300 ha. Keberadaan *gampoeng* ini strategis dalam hal pertanian terutama sawah karena terkoneksi dengan jaringan irigasi dari sumber mata air Krueng Sawang yang tidak pernah terputus sekalipun di musim kemarau. Maka, secara rutin masyarakat petani sawah di Meunasah Pinto tetap dapat memanen sawahnya 2 kali dalam setahun. Sesuatu yang belum tentu dapat dilakukan oleh petani sawah di banyak *gampoeng* lainnya di Aceh Utara. Apalagi pada *gampoeng-gampoeng* yang pertanian sawahnya tergantung pada tadah hujan. Di banyak *gampoeng* di Aceh Utara, tiap kali memasuki masa transisi menuju kemarau maka dapat dipastikan petani gagal panen akibat puso atau pelbagai hama yang menyerang. Sementara, Meunasah Pinto hampir tidak mengalami persoalan yang secara rutin dikeluhkan oleh banyak petani lainnya di Aceh Utara itu.

Arti strategis Meunasah Pinto secara politik pertanian sawah di Aceh Utara selain karena karunia kesuburan tanah pertanian sawahnya juga dikarenakan letak perbatasan geografisnya yang diapit oleh pelbagai *gampoeng* yang sumberdaya ekonomi masyarakatnya berbasiskan pada pertanian sawah yaitu Meunasah Lhok dan Meunasah Baro di Utara, Teumpok Beuradang di Timur, Teupin Banja dan Lagang di Selatan dan Kuala Dua di sebelah Barat sehingga “memaksa” pemerintah Aceh memberi perhatian lebih dalam penyediaan air untuk kepentingan persawahan.

Tidak hanya geografinya yang menarik perhatian, memasuki *gampoeng* yang dipimpin oleh Geuchiek (Kepala Desa) M. Yusuf Ibrahim ini pengunjung juga betah berlama-lama dengan keramahan dan reilijiusitas masyarakatnya. Anak-anak kecil yang riang disawah dan tempat pengajian menjadikan suasana batin siapa saja yang bertamu merasa tenang. Desa ini terdiri dari 158 kepala keluarga yang terdiri dari 316 penduduk laki-laki dan 331 perempuan. Penduduk yang berjumlah total 646 Jiwa ini tersebar dalam dua dusun yaitu Dusun Cot Kuta dan Dusun Cot Teungoh (BPS: Kecamatan Muara batu Dalam Angka 2015).

Jarak Meunasah Pinto dengan Ibu Kota kecamatan yang hanya 2,5 Km menjadikan warga *gampoeng* ini mudah bersentuhan dengan pelbagai informasi khususnya terkait dengan pertanian. Maka, sebagai daerah pertanian khususnya pertanian sawah pelbagai kebijakan pemerintah khususnya dalam usaha-usaha peningkatan produktivitas gabah *gampoeng* ini menjadi prioritas di daerah Kecamatan Muara Batu. Pelbagai kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian yang dilakukan oleh pemerintah sejak 1990-an dilaksanakan di *gampoeng* ini. Tidak mengherankan keberadaan geografi yang mendukung dan letaknya yang dekat dengan Ibu Kota kecamatan menjadikan Meunasah Pinto sebagai salah satu *gampoeng* percontohan dalam hal produktivitas pertanian padi di Aceh Utara. Dari 646 orang warga Meunasah Pinto, lebih dari 80% diantaranya hidup dari bertani khususnya pertanian sawah<sup>2</sup>. Maka, bertani merupakan bagian dari identitas utama masyarakat di *gampoeng* ini.

Masyarakat Meunasah Pinto merupakan masyarakat petani  
2. Wawancara dengan Muhammad Yusuf, Geuchiek Gampoeng Meunasah Pinto, 17 Juni 2016

Islam yang bersahaja. Pola-pola sosial mereka diikat oleh kesamaan agama, geografi dan pola pencarian nafkah. Pada kenyataannya, semua orang Meunasah Pinto beragama Islam<sup>3</sup>. Mereka adalah masyarakat yang religius dan penganut Islam fanatik. Islam yang berkembang disini adalah Islam Ahlusunnah wal jamaah. Secara fiqh mereka merupakan pengikut Imam Syafi'i dan secara teologis pengikut Al-Asy'ari. Keterikatan yang kuat antara orang Meunasah Pinto dengan Islam menjadi landasan ditematkannya Islam (khususnya ajaran mazhab Imam Syafi'i) tidak hanya sebagai agama tetapi juga dimaknai sebagai sistem cara pandang dunia (*worldview*). Maka Islam menjadi sumber referensi dalam menilai segala persoalan dan sikap serta keputusan terutama dalam bertani. Selain itu, Islam juga dimaknai sebagai bagian dari identitas.

Islam sebagai sistem cara pandang dunia (*worldview*), terefleksikan pada ungkapan tradisional orang Aceh (Hadih Maja) yaitu, "Hukom Ngon Adat Han Jeeut Cree, Lagee Zat Ngon Sifeut". (Hukum/Syariat Islam dengan adat/kehidupan sosial tidak boleh bercerai seperti zat dengan sifatnya) (H.M. Zainuddin, 1980: 110). Sementara sebagai identitas terefleksikan pada kenyataan orang Meunasah Pinto tersinggung dan marah jika mereka dikata-katai sebagai orang-orang yang berperilaku "Nggak Islami", meskipun dalam kehidupan kesehariannya mereka tidak mempraktikkan kewajiban-kewajiban agama dengan baik seperti Shalat dan Puasa, misalnya. Eratnya hubungan Islam dan orang Meunasah Pinto ini direfleksikan dalam ungkapan filosofi, "Ta Peutenteu Udep Lam Iseulam Sampo An matee" (Kita pastikan hidup kita dalam Islam sampai mati) (Ismuha, 1983: 11).

Karena Islam diterima sebagai satu-satunya sumber nilai dalam kehidupan sosial, maka dalam masyarakat Meunasah Pinto dan Aceh umumnya tidak dikenal pembelahan sosial dan budaya berdasarkan agama sebagaimana yang terjadi di Jawa. Jika di Jawa sebagaimana yang ditunjukkan oleh studi Geertz, penetrasi Islam melahirkan tiga varian struktur kebudayaan yaitu Abangan, Priyayi dan Santri (Clifford Geertz, 1981: 13, 165 dan 307). Sebaliknya, di Meunasah Pinto, Islam justru tampil sebagai penyatu dalam bingkai struktur sosial dan budaya mereka.

Jika disebagian besar pulau Jawa, Islam dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan tradisi-tradisi yang telah berabad-abad umurnya yaitu sebagiannya tradisi penduduk asli dan sebagian yang lainnya tradisi Hindu-Budha serta dalam prosesnya banyak kehilangan kekakuan doktrinernya. Lalu akibatnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Geertz dan Benda, untuk jangka waktu yang lama pemenang sebenarnya adalah agama Jawa (*The Religion of Java*) dan bukannya Islam, adat-istiadat Jawa, bukannya hukum Qur'an, Feodalisme Jawa bukannya peradaban Islam yang bersifat urban (Harry J. Benda, 1985: 31). Dengan kata lain, kebudayaan yang mempengaruhi Islam bukan Islam yang mempengaruhi kebudayaan Jawa. Sebaliknya di Aceh dan khususnya di Meunasah Pinto, Islamlah yang mempengaruhi kebudayaan dan menjadi sumber rujukan utama dalam pelbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Aspek kultural, ideologis dan struktural masyarakat Meunasah Pinto bersenyawa dengan adat istiadat dan agama Islam ini.

Derivasi nilai-nilai keislaman membentuk karakteristik sosial masyarakat Meunasah Pinto. Sebagaimana diajarkan oleh ajaran-ajaran Islam, mereka hidup dengan penuh kesederhanaan namun memiliki ethos kerja yang tinggi. Secara gigih masyarakatnya memperjuangkan kehidupannya melalui aktivitas pertanian, terutama padi. Pergi kesawah (*Jak U Blang*) merupakan kata

3. Data Monografi Gampoeng Meunasah Pinto, 2015

kunci yang selalu mewarnai pola kehidupan sosial masyarakat ini. Bertani disawah merupakan suatu aktivitas yang terwarisi dan diwarisi secara turun temurun dalam kehidupan sosial mereka.

Tabel. 1. Pekerjaan Utama Kepala Keluarga

Pekerjaan Utama Kepala Keluarga	Jumlah	%
Petani	22	55
Buruh Non Pertanian (bangunan, bengkel, dll)	6	15
Pedagang	4	10
Buruh Tani	1	2.5
Ibu rumah tangga	1	2.5
Honorar	1	2.5
Tidak Bekerja	5	12.5
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>100</b>

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas responden atau penduduk di lokasi penelitian bekerja sebagai petani, yaitu mencapai 55 %.Selebihnya memiliki jenis pekerjaan yang bervariasi, namun lebih banyak berprofesi sebagai buruh non pertanian, yaitu mereka yang bekerja sebagai buruh bangunan atau bekerja di bengkel. Ada beberapa responden yang kepala keluarganya tidak bisa lagi bekerja karena usia lanjut atau sakit.

Begitu pentingnya arti pergi kesawah bagi masyarakat disini, sehingga selain lebih dari 55 % warganya yang mencari nafkah dari bertani, anggota masyarakat lainnya yang karena pendidikannya mampu menjadi pegawai negeri sipil (PNS) pun tetap memiliki sawah dan mengupahkan warga gampoeng lainnya untuk menggarap sawah mereka. Signifikansi mejalankan pertanian sawah ini merupakan turunan dari konsepsi paham ideologis mereka bahwa “*Pang Ule Ibadat Seumbahyang, Pang Uleu Hareukat Meugoe* (yang Utama Dalam Ibadat adalah Sembahyang/Shalat dan Yang Utama Dari Bekerja Adalah Bertani Sawah)<sup>4</sup>”.

Semboyan itu merupakan dasar pandangan dunia (*Worldview*) orang-orang Meunasah Pinto sehingga bertani padi tidak dimaknai hanya sebagai mata pencaharian tetapi sebagai identitas dalam mempertahankan dan menjalankan hidup.Maka, meskipun memiliki profesi bukan sebagai petani padi mereka tetap menanam padi disawahnya masing-masing.Hingga dengan tahun 1980-an aktivitas pertanian sawah beorientasi subsisten yaitu bertani hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga saja.Namun, pasca intervensi pemerintah pada pertanian sawah di Meunasah Pinto pada tahun 1990-an orientasi pertanian sawah berubah menjadi komersil.

Sebelum perubahan orientasi bertani dari subsisten ke komersil, hubungan kebersamaan yang terbentuk di masyarakat Meunasah Pinto baik kesamaan geografi, agama, pola interaksi sosial, mata pencaharian dan intensitas pertemuan yang tinggi mampu melahirkan norma sosial yang sama. Kesamaan norma sosial melahirkan resiprositas yang tinggi pula terhadap pelbagai persoalan yang dihadapi. maka hubungan-hubungan sosial yang terbentukpun menjadi hubungan-hubungan emosional yang penuh kehangatan.

Kegotong-royongan menjadi ciri utama.Realitas ini mengikat hubungan emosional yang menyatukan pelbagai pihak.  
4. Wawancara dengan Nek Chiek (65 Tahun) Warga Gampoeng Meunasah Pinto, 19 Mei 2016

Kebersatuan hubungan emosional menciptakan prinsip “Satu untuk semua dan semua untuk satu” (*Sidroe Keu Bandum, Bandum Keu Sidroe*). Turunan kebersamaan itu terjalin dalam tindakan praktis mereka yang selalu memandang permasalahan yang dihadapi oleh setiap individu dalam masyarakat sebagai masalah bersama. Kenyataan ini mendorong warga Meunasah Pinto selalu terlibat dalam menjaga, menghadapi dan memecahkan persoalan secara bersama.Pemeliharaan hubungan emosional kolektif masyarakat petani sawah di meunasah Pinto diikat oleh adat “*kenduri Blang*” (Petani Sawah).Kenduri Blang dilakukan setiap kali masa turun sawah. Pada masa kenduri Blang dengan kesadaran sendiri masyarakat mempersiapkan masakan special dengan lauk yang paling disukai umumnya kari ayam sebagai menu utamanya. Selain itu, mereka secara kolektif juga mempersiapkan masakan utama berupa kari kambing dan sapi. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara kolektif baik pendanaannya yang dilakukan secara iuran maupun pelaksanaannya.

Praktik pelaksanaannya diawali dengan shalawat nabi, ceramah agama yang berisi tentang pentingnya penguatan persaudaraan antar warga gampoeng (*ukhuwah khartiyyah*) dan gotong royong dalam menjalani kehidupan. Tausiah diakhiri dengan do’a meminta ampunan terhadap segala kealpaan dan permohonan pada Allah SWT agar musim tanam kali ini dapat terlaksana dengan baik dan mendatangkan hasil yang optimal. Puncak acara Kenduri Blang adalah makan bersama.Pada saat makan bersama ini para peserta saling bertukar makanan yang dibawanya dengan warga lainnya.Tidak kalah pentingnya juga menyediakan makanan khusus pada warga tetangga gampoeng yang diundang.Saat santap bersama ini semua warga terlibat dalam keceriaan baik tua, muda dan anak-anak.

Makan bersama memiliki makna sosial yang signifikan utamanya dalam merajut kembali hubungan-hubungan sosial yang renggang akibat dari interaksi sosial yang kadangkala harus menimbulkan sikap kritis antar pihak. Saat makan bersama semua warga duduk melingkar. Saling bertatap. Mereka saling berbagi makanan. Setiap warga menukar makanannya dengan warga yang lain. Melalui metode ini warga menyantap makanan bukan dari apa yang ia bawa, melainkan apa yang diberikan oleh warga gampoengnya yang lain kepadanya. Situasi ini mengikat warga dalam hubungan jasa makanan antara yang satu dengan yang lainnya. Maka, antara warga saling terikat dan senantiasa menempatkan warga lainnya sebagai saudara mereka yang sesungguhnya. Selain itu pola sosial yang terbangun dari kenduri blang ini menjadi fundasi terputuskannya hubungan-hubungan konflik laten antar warga (*cross cutting affiliation*).

Karakteristik solidaritas yang terbentuk dalam masyarakat Meunasah Pinto ini meminjam istilah Emile Durkheim disebut sebagai solidaritas mekanik. Dalam solidaritas mekanik ikatan utamanya adalah kepercayaan bersama, cita-cita dan komitmen moral yang sama. Melalui norma yang sama itu lahir kesadaran kolektif bersama. Disini individualitas ditekan sementara homogenitas ditonjolkan. (Johnson, 1994: 183). Sebagai masyarakat organik, orang Meunasah Pinto senantiasa menjaga individu agar berperilaku sebagaimana maunya norma kelompok. Tekanan sosial bersifat keras terhadap anggota kelompok yang berperilaku mengancam eksistensi norma bersama.

Individu yang “berani” melahirkan paham dan perilaku berbeda dituntut kehati-hatian ekstra tinggi agar tetap dapat hidup berdampingan. Jika tidak, sanksi sosial keras siap mengancam individu yang bersebelahan dengan norma bersama itu. Perbedaan dihargai sejauh dipandang tidak mengancam norma

umum (*mainstream*) masyarakat. Pelanggar akan menghadapi sanksi di "keluar" (eksklusi) dari komunitas. Maka komitmen moral untuk menjaga norma dan solidaritas kelompok amat ditekankan.

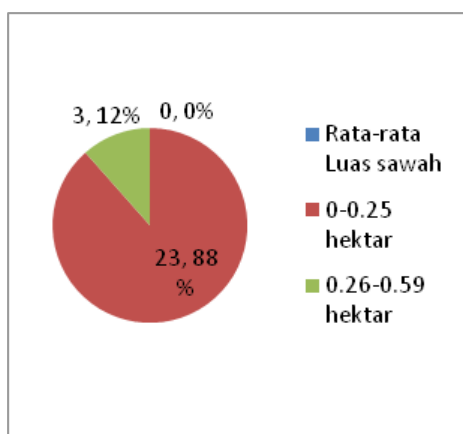
Namun komersialisasi orientasi pertanian yang dimulai sejak tahun 1990-an yang meskipun secara statistik mampu meningkatkan produktivitas gabah berlipat-lipat namun pola-pola hubungan sosial mulai bergeser di Meunasah Pinto. Komersialisasi pertanian merubah pola hubungan sosial dari emosional menjadi rasional. Pola-pola kekerabatan dan kegotongroyongan dalam mengolah dan memanen hasil pertanian berubah menjadi pola-pola upahan. Pada posisi ini meskipun secara tegas belum terjadi perubahan yang mencolok namun hubungan-hubungan sosial yang bersifat personal mulai mengemuka.

### Kepemilikan Lahan Sawah Masyarakat Meunasah Pinto

Bagi petani, memiliki sawah adalah syarat utama untuk menyambung hidup. Melalui sawahlah kehidupan dimulai dan dijalani hingga akhir kehidupan. Kepemilikan sawah menempatkan mereka memiliki posisi mulia dalam jaringan sosial masyarakat *gampoeng*. Status sosial, posisi strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan di *gampoeng* dan juga kemungkinan dapat terpilih dalam jabatan politik ditingkat *gampoeng* ditentukan oleh kepemilikan sawah.

Realitas yang sama terjadi pada masyarakat Meunasah Pinto, hubungan-hubungan sosial terkait erat dengan kepemilikan sawah. Meskipun, berpengetahuan agama yang mumpuni ikut mempengaruhi, namun sulit membayangkan jika ada anggota masyarakat yang tidak memiliki sawah dapat terpilih sebagai *Geuchiek* (Kepala Desa). Begitupula, dengan hal-hal lainnya yang menyangkut dengan pengambilan keputusan, mereka yang memiliki sawah lah yang paling diperhatikan pendapatnya.

Selain dalam hal sosial-politik, kepemilikan sawah tentu saja merupakan sumberdaya ekonomi utama bagi mereka. Produktivitas sawahlah yang menjadi sumber kehidupan baik dalam memenuhi kehidupan harian, maupun untuk kepentingan pendidikan anak dan yang lain sebagainya. Realitas itu mendasari kokohnya sikap warga Meunasah Pinto untuk mempertahankan sawahnya, meskipun ia terdesak oleh kebutuhan lainnya. Namun, sebagai masyarakat petani sawah, luas lahan sawah yang dimiliki oleh petani Meunasah Pinto tidaklah terlalu luas. Mereka rata-rata hanya memiliki sawah seluas 0,25 hektar (seperempat hektar)<sup>5</sup>.



Gambar 2. Status Kepemilikan Luas Lahan Petani Meunasah Pinto

5. Monografi Gampoeng Meunasah Pinto, 2015

Berdasarkan hasil survey, jika dilihat pada luas sawah yang dikelola oleh petani, baik petani pemilik maupun petani dengan sistem bagi hasil, maka hanya 3 responden (11.5 %) responden yang mengelola sawah lebih dari 0.25 Hektar, sedangkan selebihnya (88.5 %) hanya mengolah sawah kurang dari 0.25 Hektar.

### Perubahan Pola Produksi Pertanian di Meunasah Pinto

Selama 30 tahun terakhir, globalisasi dan struktur ekonomi dunia mempengaruhi kehidupan masyarakat di pedesaan. Hasil penelitian di pedesaan Amerika menunjukkan bahwa sistem kehidupan di pedesaan telah mengalami perubahan, seperti berkurangnya ketergantungan pada pekerjaan di sektor pertanian karena berkembangnya industri dan persaingan yang semakin tinggi (Vias, 2006). Demikian pula yang terjadi di Meunasah Pinto, modernisasi dan sistem ekonomi atas desa menyebabkan terjadinya perubahan sistem pertanian masyarakat di sana. Kajian Dharmawan (2000), menunjukkan kecenderungan adopsi beberapa tindakan strategis penghidupan di kalangan masyarakat petani pedesaan terus meningkat. Modal sosial mempunyai peran yang cukup penting dalam strategi nafkah rumah tangga miskin dan dapat menjadi salah satu pokok perhatian dalam upaya penyusunan strategi nafkah berkelanjutan (Widodo, 2011).

#### 1. Perubahan Pola Bajak Sawah

Turun kesawah (*Troen U Blang*) adalah saat yang paling dinantikan oleh masyarakat agraris seperti masyarakat Meunasah Pinto. Pada momen ini semua warga bergembira, tua, muda, laki-laki dan perempuan mempersiapkan diri dengan penuh keceriaan. Selain sebagai wahana utama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, turun kesawah merupakan media pernyataan identitas diri mereka yang hakiki sebagai petani. Semua warga bergegas, melakukan tugas pada bidangnya masing-masing. Ada yang bersiap dengan peralatan *langai* (alat bajak sawah tradisional Aceh), mempersiapkan kerbau, dan makanan yang akan diberikan kepada para pembajak setelah lelah melakukan pekerjaannya.

Aparat *keujruen blang* (lembaga tradisional yang mengelola sistem turun sawah di Aceh. lembaga ini mirip dengan "Subak" di Bali) selain menentukan waktu yang tepat untuk turun kesawah dan sistem pengairannya juga menentukan bagaimana proses bajak sawah dilakukan dan dimulai. Secara tradisional proses pembajakan sawah di Meunasah Pinto dilakukan dengan menggunakan media kerbau. Tidak semua kerbau dapat dijadikan sebagai pembajak yang baik. Kerbau yang dapat digunakan untuk membajak sawah adalah kerbau yang bulu pusarnya seimbang antara yang disebelah kanan, kiri dan tengah-tengah kepala.<sup>6</sup>

Ciri-ciri kerbau ini bukan karena faktor kepercayaan *an sich* tetapi terbukti dalam pengalaman empiris warga Meunasah Pinto. Tatkala kerbau yang dipakai bukan kerbau yang memiliki pusar seimbang maka ia sulit dikendalikan. Pada saat *ureueng me'u* (joki) menarik kesebelah kanan untuk membajak sawah, si kerbau tidak jarang malah bergerak kekiri. Lain halnya, jika kerbau yang digunakan itu adalah kerbau yang memiliki pusar seimbang, dengan kepatuhannya ia dengan mudah dikendalikan oleh *ureueng me'u*.

Si pemilik kerbau yang dapat digunakan membajak sawah, dapat memperoleh keuntungan ganda dari kerbaunya. Keuntungan pertama ia peroleh dari harga kerbau yang meningkat disaat ia 6. Wawancara dengan Apa Suh (57 tahun) petani warga Meunasah Pinto, 23 Mei 2016



menjualnya dan yang kedua dari hak bajak sawah warga. Oleh karena kerbau tidak dimiliki oleh banyak warga, maka semua warga berusaha menjaga hubungan baik dengan pemilik kerbau. Menjaga hubungan baik dengan pemilik kerbau berarti juga menjaga hubungan baik dengan semua warga, sebab pemilik kerbau dan warga umumnya secara genealogis terikat dalam hubungan darah.

Setelah aparat *keujruen blang* menentukan waktu untuk membajak dan sawah milik siapa yang pertama kali dibajak, semua warga secara antusias menyambut proses ini. Saat sawah salah satu warga dibajak semua warga lain ikut membantu secara gotong royong agar sawah yang dibajak dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat segera ditanami. Pada saat itu warga bersama-sama membersihkan rumput dan membalikkan tanah yang dinilai tidak terlalu optimal terdajak. Setelah proses pembajakan selesai pemilik sawah akan memberi upah secara sukarela kepada pembajak berupa gabah pada saat panen nantinya. Lalu, pembajak sawah (*ureung meu'u*) akan beralih kesawah warga lainnya dan wargapun secara gotong royong bergerak membantu proses pembajakan itu kesawah lainnya yang dituju oleh pembajak sesuai dengan ketetapan dari pihak *keujruen blang*.

Dengan menggunakan kerbau, satu petak sawah rata-rata dapat terdajak secara tuntas dalam waktu dua hari. Maka, agar waktu yang digunakan efisien warga secara berkelompok membantu proses ini sehingga pelaksanaan aktivitas persawahan tidak terganggu. Proses pembajakan sawah ini berlangsung hingga dengan tahun 1980-an. Memasuki fase tahun 1990-an gerakan intensif modernisasi praktik produksi pertanian yang dilancarkan oleh pemerintah Orde Baru “memaksa” kerbau bergeser dengan traktor.<sup>7</sup> Di Aceh melalui kebijakan pembangunan yang dilancarkan oleh Gubernur Ibrahim Hasan, traktorisasi bajak sawah berlangsung secara massif.

Berdasarkan prinsip efisiensi dan efektifitas, kerbau-kerbau dikandangkan dan traktor meluncur disawah-sawah. Dalam konteks, efisiensi waktu dan efektifitas pergantian kerbau dengan traktor jauh lebih efektif. Namun pergeseran ini memberi efek lain bagi masyarakat Meunasah Pinto. Efek negatif yang paling menonjol terdapat pada tiga hal yaitu bergantinya pola gotong royong dengan pengupahan, berkurangnya tenaga kerja dan bergantinya pola bajak sawah yang bersifat komunal menjadi individualistik.

Bajak sawah melalui media kerbau meskipun pembajak memperoleh jerih payahnya dari pemilik sawah namun jerih payah itu tidak diberikan dalam bentuk uang namun padi (gabah) disaat panen tiba. Besarannya pun tidak ditentukan. Pemilik sawah dapat memberikan dengan mengkalkulasi besaran hasil panen yang ia peroleh. Dalam model bajak kerbau ini semua pihak baik pembajak maupun pemilik sawah saling mengikhhlaskan apa yang mereka beri dan terima. Prinsipnya lebih bermakna gotong royong daripada ekonomi uang. Tat kala, bajak sawah bergeser ke traktor ongkos bajak ditetapkan secara pasti berdasarkan luas sawah yang dibajak.

Pelaksanaan bajak sawah dengan kerbau membutuhkan tenaga kerja lebih dari dua orang, sedangkan dengan menggunakan traktor cukup dilakukan satu orang saja. Hal ini memberi dampak pada hilangnya pekerjaan dua orang tenaga kerja pada setiap kelompok pembajak sawah. Dalam konteks yang luas kedua tenaga kerja yang pengangguran ini pada akhirnya terpaksa berurbanisasi untuk menghidupi kehidupannya.

7. Wawancara dengan Sekretaris Desa Meunasah Pinto, 23 Mei 2016

Sementara dimensi sosial lain yang mengemuka dalam pergeseran proses pembajakan sawah ini adalah bergesernya komunalitas dalam proses pembajakan. Membajak dengan kerbau dilakukan secara bergotong royong ada pembajak, anggota kelompok sawah yang ikut membantu mempercepat proses bajak agar segera dapat digunakan untuk tanam dan ada ibu-ibu yang menyiapkan makan siang bersama. Kerja komunalitas ini mempertautkan hubungan emosional dan transfer informasi. Namun, pola bajak dengan traktor merubah konstelasi sosial ini menjadi kerja individual.

## 2. Pergeseran Sistem Tanam

Menanam padi yang dalam sebutan masyarakat Meunasah Pinto disebut dengan *seumula*, segera dilakukan setelah lahan berhasil dibajak dan rumput-rumput dibersihkan. Jika dalam prosesi bajak sawah kaum laki-laki yang berperan dominan maka saat musim tanam tiba kaum ibu-ibulah yang menjadi aktor utama. Penanaman padi di Meunasah Pinto dilakukan secara kolektif. Praktik kerja kolektif penanaman padi ini disebut dengan “*kereuja meu urup*”.<sup>8</sup> *Meu Urup* adalah kerja sosial yang dilakukan secara kolektif dan bersifat repositas dimana setiap anggota yang terlibat saling terkait dalam mengerjakan sawah secara bersama-sama.

Pola ini dilakukan secara bergilir dimulai dari sawah salah satu anggota kelompok yang lalu anggota kelompok yang sawahnya telah berhasil ditanami melalui arahan salah satu anggota kelompok yang dituakan akan ikut terlibat menanam sawah anggota kelompok yang lainnya. Praktik penanaman ini dilakukan secara berputar dalam lingkaran anggota kelompok “*meu urup*” (*inner circle*) hingga pada akhirnya semua sawah dari setiap anggota kelompok tertanami.

Pola penanaman ini tidak berupah, artinya setiap orang tidak diberi uang dalam kerja *meu urup* ini. Imbalannya terletak pada terselesaikannya penanaman benih disawah semua anggota *meu urup*. Pada saat penanaman benih dilakukan anggota *meu urup* yang sawahnya terkena giliran ditanami hanya terbebani dengan menyediakan makanan ala kadar kepada seluruh anggota yang terlibat khususnya diberikan pada saat istirahat. Tidak ada paksaan dalam penyediaan makanan ini, bahkan tidak jarang bagi yang memiliki makanan berlebih dirumah seperti pisang rebus, ketela rebus maupun kacang rebus maka ia akan membawa kesawah untuk dimakan bersama.

Praktik sosial “*meu urup*” ini selalu menarik perhatian para perempuan muda untuk bergabung dalam kelompok “*meu urup*”. Sebab aktivitas ini bagi kaum perempuan Meunasah Pinto selalu dinilai sebagai hal yang menyenangkan. Sebab *meu urup* merupakan wadah pertemuan antar warga sehingga interaksi yang terjadi didalam kelompok dimanfaatkan oleh mereka untuk melepas kesuntukan dan bertukar informasi. Ibu Wardah salah satu anggota kelompok *me urup* mengatakan:

*“Kerja di sawah itu menyenangkan, karena kalau dirumah suntuk tidak ada teman dan tidak ada orang yang dapat diajak bicara. Kalau ikut meu urup dengan teman-teman kita menjadi senang sebabada teman untuk mengobrol dan kita jadi tahu juga informasi baru tentang warga desa lainnya”.*<sup>9</sup>

Maka bukan hal yang aneh, ketika musim tanam tiba para anggota *meu urup* tidak jarang kedatangan anggota baru. Anggota baru sebagaimana mahasiswa di kampus tidak  
8. Wawancara dengan Geuchiek Meunasah Pinto, 13 Juni 2016  
9. Wawancara dengan Wardah waga Meunasah Pinto 27 Mei 2016

langsung dipercaya untuk mengambil peran tetapi ia dilatih terlebih dahulu dengan diajarkan metode menanam yang “baik” dan lalu mempraktikkannya langsung dengan terlebih dahulu memperhatikan para seniornya. Kenyataan ini membuat kelompok *meu urup* tidak pernah kekurangan kader. Maka, kontinuitas eksistensi kelompok *meu urup* tetap terjaga dan berkelanjutan.

Namun, interaksi masyarakat Meunasah Pinto dengan teman-temannya yang menjadi penduduk urban, perkembangan teknologi informasi dan sentuhan modernisasi pertanian yang digalakkan pemerintah sejak tahun 1980-an akhirnya memaksa praktik *meu urup* ini lambat laun memudar. Hingga dengan paruh akhir tahun 1990-an praktik *meu urup* meskipun tidak semuanya namun sebagian kecil kelompok masyarakat Meunasah Pinto masih mempraktikkannya. Kini praktik kerja repositas ini sudah benar-benar hilang dari Meunasah Pinto dan digantikan oleh sistem kerja upahan.

Kini, dikala musim tanam tiba masyarakat menyibukkan diri dengan mencari tukang tanam dan mengumpulkan uang untuk ongkosnya. Ongkos tanam berkisar Rp. 75.000/per orang/setengah hari. Praktik tanam upahan mulai memperlihatkan segregasi sosial dimasyarakat. Bagi anggota masyarakat dari kelas menengah keatas, biaya tanam tidak menjadi persoalan. Namun, bagi kelas bawah hal ini memberatkan. Situasi inipun mengubah pola-pola hubungan sosial terutama dalam hal membantu pekerjaan dengan sesama warga. Hingga dengan tahun 1990-an, jika ada warga meminta tolong membantu pekerjaan apapun pada warga lainnya biasanya dengan senang hati mereka membantu. Namun, saat ini pekerjaan apapun harus di negosiasikan harga upahnya terlebih dahulu, kecuali untuk pekerjaan berupa kenduri pernikahan, kelahiran, kematian dan keagamaan<sup>10</sup>.

Orang-orang kaya gampoeng (desa) tidak dapat lagi meminta bantuan tenaga kerja dari orang miskin kecuali telah disepakati ongkosnya. Orang-orang miskin juga tidak dapat berhutang dengan mudah pada orang kaya kecuali si orang kaya yakin bahwa si miskin mampu atau memiliki sumberdaya yang dapat diharapkan untuk membayar hutangnya. Pendek kata, sistem upahan dalam pola pertanian di Meunasah Pinto mengubah pola-pola hubungan sosial yang bersifat emosional mekanik menjadi organik. Hubungan-hubungan sistem tanam yang bersifat komunal, melalui sistem upahan yang baru ini berubah menjadi individualistik.

### 3. Perubahan Teknik Panen

Panen yang dikenal dengan sebutan “*Keumeukoh*” adalah fase yang amat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Meunasah Pinto. Masa ini disambut dengan suka cita. Imajinasi kebersamaan dan pendapatan ekonomi untuk menyambung hidup adalah hal yang selalu ada di pelupuk mata. Tatkala masa panen ini tiba, maka masyarakat bergegas membicarakan bagaimana prosesnya dilakukan. Karena panen selalu dilakukan secara gotong royong, maka masyarakat lalu berembuk membentuk kelompok-kelompok kecil. Untuk tiap petak sawah yang luasnya seperempat hektar biasanya dipanen oleh 5 orang. Sementara yang setengah hektar 10 orang dan yang satu hektar dipanen oleh 15 sampai 20 orang.

Selain membicarakan pembentukan kelompok permanen, masyarakat yang dipimpin oleh pimpinan Keujruen Blang (Organisasi Pengelolaan Sawah Tradisional) juga berembuk menentukan dari sawah milik siapa proses pemanenan ini

dimulai. Setelah keputusan dalam musyawarah diputuskan secara bersama-sama maka musyawarah akan diakhiri dengan do’a. Do’a yang dipimpin oleh *teungku imeum* (kyai desa) berisi permohonan kepada Allah SWT agar panen yang akan dilakukan berjalan dengan lancar, terjaga kekompakan dan memperoleh hasil yang maksimal. Keeseokan harinya panen pun dimulai.

Panen dilakukan dengan menggunakan “*Gleum*” yaitu sejenis ani-ani namun berbentuk khas Aceh. Karena menggunakan *Gleum*, maka panen sulit dilakukan sendiri sebab membutuhkan waktu yang lama. Untuk sawah yang luasnya seperempat hektar jika satu orang yang memanen membutuhkan waktu hingga sepuluh hari. Namun dengan kerja kolektif dalam waktu empat hari selesai. Setelah padi berhasil dipanen, warga secara kolektif menyusun dalam satu tumpukan besar berbentuk gunung. Lalu, *keujruen blang* bersama warga berembuk menentukan waktu dan sawah milik siapa terlebih dahulu yang akan dirontokkan.

Perontokan padi menjadi gabah dilakukan dengan menggunakan kaki. Aktivitas ini di Meunasah Pinto dikenal dengan sebutan “*Geumeulo*”. Proses *geumeulo* dimulai dengan meletakkan padi yang telah dipanen di kaki lalu dengan gerakan gulungan padi akan rontok satu persatu. Proses ini dilakukan secara terus menerus hingga semua padi rontok, lalu si tukang *geumeulo* akan mengambil padi berikutnya hingga padi yang tersusun dalam gunung habis. Kerja *geumeulo* ini dilakukan secara kolektif oleh masyarakat Meunasah Pinto. Pemilik padi tidak dituntut memberi upah kepada peserta “*geumeulo*”. Dalam pelaksanaan “*geumeulo*” ini pemilik padi hanya diminta menyiapkan “*Kuah Tuhe*”, yaitu hidangan tradisional masyarakat Aceh yang manis berupa ketan dengan kuah kolak yang berisi pisang raja, nangka dan santan<sup>11</sup>.

Setelah, “*Geumeulo*” disatu tempat selesai warga termasuk pemilik sawah yang padinya sudah dirontokkan sebelumnya akan bergerak melakukan hal yang sama secara bergiliran ke padi milik warga lainnya. Hal ini dilakukan secara intensif sehingga semua gunung padi yang telah selesai di panen berhasil dirontokkan semua. Setelah proses perontokkan selesai warga membagi hasil panennya kedalam tiga bagian yaitu untuk zakat, simpanan untuk dimakan sendiri dan dijual.

Praktik potong padi dengan menggunakan “*Gleum*” dan perontokannya menggunakan sistem “*Geumeulo*” yang bersifat gotong-royong dan repositas ini berlangsung hingga dengan awal tahun 1990-an. Saat ini, sejalan dengan komersialisasi dan maniasi kehidupan sosial yang mendera Aceh Utara ikut merubah dan menggeser pola-pola sosial di Meunasah Pinto. Kini potong padi tidak lagi dilakukan menggunakan “*Gleum*” tapi menggunakan “*Sadeup*”. *Sadeup* adalah alat potong yang terbuat dari besi, bergerigi dan berbentuk lengkung. Penggunaan “*Sadeup*” lebih efisien secara waktu karena dapat dilakukan dalam waktu lima puluh persen lebih sedikit daripada menggunakan “*Gleum*”.

Namun, *keumeukoh* (potong padi) saat panen tiba ini tidak lagi dilakukan secara gotong royong tetapi menggunakan sistem upahan. Proses “*kemeukoh*” saat ini dilakukan oleh rata-rata 3 sampai 5 orang untuk setiap petak sawah. Setiap orang berupah Rp. 75000/ orang jika perempuan. Namun, jika yang “*Kemeukoh*” itu laki-laki maka upahnya Rp. 100.000/orang. Perbedaan upah ini karena dalam pandangan masyarakat laki-laki lebih cepat dan mempunyai tenaga lebih kuat dibanding dengan perempuan<sup>12</sup>.

11. Wawancara dengan Ibu Fatimah, warga Meunasah Pinto, 10 Juni 2016

12. Wawancara dengan M. Yusuf, warga Meunasah Pinto, 25 Juni

10. Wawancara dengan Geuchiek Meunasah Pinto, 5 Juni 2016



Setelah “*Keumeukoh*” selesai, maka padi-padi yang diletakkan diatas batang padi yang telah dipotong didalam sawah oleh pemilik dengan mengupahkan pada orang lain lagi di angkut kepermatang sawah atau ketempat yang lebih lebar dari pematang untuk kemudian disusun menyerupai gunung. Aktivitas ini disebut dengan “*Peuteungoh Pade*”. Upah untuk “*peuteungoh pade*” adalah 100.000/hari/orang. Keesokan harinya, pemilik memanggil tukang rontok yang akan merontokkan padi dengan mesin. Tidak ada lagi “*Geumeulo*” yang dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat. Suasana kegembiraan warga dan anak-anak muda berkumpul bersama dan menyantap “*Kuah Tuhe*” berganti dengan suasana serius dan serba uang.

Bergantinya “*Geumeulo*” dengan mesin merubah hubungan emosional dan solidaritas sosial yang bersifat mekanik menjadi organik. Dari serba bersama menjadi serba urusan individu. Interaksi sosial yang serba keluarga berubah menjadi serba berapa “upah”. Kegembiraan kolektif warga dimasa panen hilang berganti dengan kegembiraan individu (itupun jika ternyata untung setelah dipotong biaya produksi)

### Intervensi Pemerintah dan Produktivitas Pertanian

Pembangunan pertanian pada dasarnya adalah proses transformasi pertanian, yaitu suatu proses perubahan pada berbagai aspek di bidang pertanian, tidak hanya berupa mekanisasi dan teknologi tetapi juga pada kelembagaan ekonomi dan sosial pertanian (Widodo, 2009). Dampak pembangunan pertanian yang dilaksanakan terhadap kesejahteraan petani sangat relevan untuk dilakukan pengkajian. Pengkajian tersebut terutama diarahkan untuk nilai kebijakan yang memberi dampak positif, negatif atau netral terhadap kesejahteraan petani (Asmara, 2016).

Sejak dikembangkannya gerakan *revolusi hijau*, pemanfaatan berbagai teknologi seperti teknologi kimia dan teknologi alat dan mesin pertanian (alsintan) telah terjadi peningkatan produktivitas pertanian yang sangat pesat. Namun di sisi lain terjadi kerusakan lingkungan hidup dan tatanan kehidupan sosial di pedesaan (Rangkuti, 2010).

Kebijakan pembangunan pertanian dengan pola top down dan orientasi produksi melalui penggunaan teknologi modern yang sangat teknis mekanistik, telah menimbulkan masalah-masalah dan perubahan-perubahan (Munthe, 2007). Demikian pula yang terjadi di Meunasah Pinto, perkembangan teknologi pertanian dan terbukanya akses terpasar pasar di luar desa menimbulkan perubahan di desa tersebut.

#### 1. Produktivitas Gabah Sebelum Intervensi Pemerintah

Sebelum ada intervensi pemerintah, petani di Meunasah Pinto menggunakan benih lokal (*padee glee*) yang masa tanamnya lama ( $\pm$  6 bulan) sehingga hanya 1x musim tanam selama setahun. Benih padi yang digunakan umumnya diperoleh dari gabah yang dipanen pada musim tanam sebelumnya. Kegiatan tanam padi yang hanya bisa dilakukan 1 kali setahun juga disebabkan karena belum dibangunnya saluran irigrasi sehingga pengairan sawah masih bergantung pada air hujan (sistem sawah tadah hujan), sehingga musim tanam padi hanya bisa dilakukan pada saat datangnya musim hujan.

Bibit yang bersifat alami (bukan merupakan hasil rekayasa keilmuan) dan musim tanam yang hanya sekali dalam setahun menyebabkan hasil panen tidak optimal. Dalam satu kali panen setiap hektar sawah hanya mampu menghasilkan 1.875 ton<sup>13</sup>.

2016

13. Wawancara dengan M. Yusuf, Sekdes Meunasah Pinto, 23 Juni

Realitas ini tentu tidak merubah tingkatan kesejahteraan masyarakat Meunasah Pinto. Panen yang dihasilkan tidak dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Maka, sebelum adanya intervensi pemerintah pada tahun 1990-an, bertani sawah bagi masyarakat Meunasah Pinto hanya dimaknai sebagai identitas tradisi dan pekerjaan sampingan saja.

Kebutuhan ekonomi sesungguhnya terpenuhi dari hasil diversifikasi pekerjaan yaitu kesawah, kebun, menerima upahan pada pekerjaan apa saja dari orang lain dan dari hasil penjualan ternak seperti ayam, bebek, kambing maupun sapi. Untuk ayam dan bebek umumnya masyarakat memelihara milik sendiri. Sementara kambing, sapi dan kerbau umumnya memelihara punya orang lain dengan sistem bagi hasil. Pola pemeliharaan ternak dengan sistem bagi hasil ini di Meunasah Pinto dikenal dengan istilah “*Mawah*”. Dalam “*mawah*” pemelihara hanya dituntut untuk menjaga dan merawat peliharaan sebaik mungkin. Jika terjadi sesuatu pada peliharaan baik sakit maupun mati maka pemelihara tidak diwajibkan menanggung resiko.

Namun jika diperoleh untung dari hasil peliharaan maka antara yang memelihara dan pemilik akan membagi hasil untung itu berdua dengan sama besarnya. Dalam “*mawah*” ini dimensi sosial sama besarnya dengan bisnis. Bagi pihak luar hal ini tentu dianggap kurang rasional, namun bagi masyarakat Meunasah Pinto praktik mawah ini merupakan jalan keluar dalam mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi saudara-saudaranya yang kurang beruntung (miskin).

Praktik mawah merupakan katup pengaman (*safety enclave*) bagi warga Meunasah Pinto dalam menjalani kehidupannya karena pendapatan dari sawah tidak dapat diandalkan. Intervensi pemerintah untuk merubah kondisi kehidupan masyarakat Meunasah Pinto merupakan realitas yang mengemuka di tahun 1980-an<sup>14</sup>. Perubahan sosial ekonomi terjadi apabila masyarakat dapat mengandalkan kehidupan mereka dari sawahnya. Maka dibutuhkan irigasi, bibit padi unggul dan pengetahuan tentang teknik penanaman dan pemeliharaan padi yang memadai.

#### 2. Intervensi Pemerintah dalam Pertanian di Meunasah Pinto

Sejak dicanangkannya program Revolusi Hijau di Indonesia yang berusaha mencapai swasembada beras yang didukung oleh perkembangan teknologi di dunia, maka beragam inovasi di bidang pertanian mulai dikembangkan. Hal itu juga yang terjadi di Meunasah Pinto, yang antara lain ditandai dengan adanya pembangunan bendungan dan saluran irigasi teknis yang mengalirkan air ke sawah secara kontinyu sehingga sawah dapat diairi sepanjang tahun dan petani tidak lagi tergantung pada air hujan. Demikian juga dikembangkan teknologi benih padi yang memiliki masa tanam lebih singkat sehingga padi rata-rata dapat dipanen dalam jangka waktu 3-4 bulan setelah ditanam. Dengan demikian petani dapat melakukan penanaman dan panen padi 5 kali dalam dua tahun atau rata-rata 2 kali tanam setahun.

Selain itu juga mulai dikenal penggunaan traktor untuk mengolah tanah yang menggantikan peran kerbau. Berkembang pula penggunaan aneka pupuk kimia yang berfungsi untuk menyuburkan tanah dan meningkatkan kualitas tanaman padi yang ditanam. Teknologi lainnya yang juga diintroduksi pada pertanian padi sawah di Meunasah Pinto adalah penggunaan obat-obatan untuk mengusir hama, seperti herbisida untuk membasmi rumput pengganggu tanaman padi, pestisida untuk mencegah perkembangbiakan dan membunuh hewan pengganggu tanaman, seperti hama tikus, wereng, keong, dan

2016

14. Wawancara dengan Geuchiek Meunasah Pinto, 13 April 2016

sebagainya.

Pada tahap pasca panen juga dikembangkan teknologi pemotong padi berupa *sadep* ( sejenis sabit namun matanya bergerigi) yang menggantikan peran ani-ani, mesin perontok padi dan mesin penggiling gabah menjadi beras (*huller*). Bahkan dalam perkembangan terkini di Aceh, termasuk di Meunasah Pinto, secara khusus dikembangkan mesin penggiling gabah yang bentuknya lebih kecil dan lebih *mobile* sehingga bisa dioperasikan keliling desa dan dapat langsung menjangkau ke rumah-rumah petani.

Dalam upaya meningkatkan hasil produksi pertanian padi sawah di Meunasah Pinto, maka selain berkembangnya beragam teknologi pertanian yang sudah diuraikan di atas, juga ada beberapa program dari Departemen Pertanian yang dilaksanakan oleh BPP dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) pendamping desa tersebut. Program itu antara lain berupa Sekolah Lapang Pertanian Tanaman Terpadu (SLPTT) yang merupakan program pelatihan teknologi pertanian secara intensif kepada para petani yang tergabung dalam kelompok tani di desa tersebut. SLPTT di Meunasah Pinto sudah berlangsung sejak tahun 2008 sampai sekarang. Pada program tersebut, PPL secara rutin melakukan pendampingan dan introduksi teknologi baru di bidang pertanian kepada petani. Pada saat ada inovasi baru yang dikembangkan, maka sebagai media sosialisasi dan praktek petani, maka dipilih lahan petani yang ada di desa untuk dijadikan demplot (areal percontohan) sebagai tempat untuk mempraktekkan teknologi baru yang akan dikembangkan penggunaannya.

Untuk setiap areal sawah seluas 25 hektar akan dibuat satu demplot dan akan diaplikasikan berbagai cara dan teknologi terbaru, seperti persiapan tanam berupa pengolahan tanah yang benar, penggunaan benih bermutu yang terbaru, teknik persemaian dan penanaman yang dapat menghasilkan produksi secara maksimal. Bila dikelola dengan sistem pertanian yang intensif, maka produktivitas demplot di Meunasah Pinto pernah mencapai hasil 8 ton per hektar. Sedangkan di luar demplot, hasil yang berhasil dicapai petani anggota kelompok rata-rata 7.6 per hektar (Wawancara dengan PPL dan Ketua Kelompok Tani Meunasah Pinto, 21 Februari 2015).

Untuk menjamin keberlanjutan program intensifikasi pertanian di Meunasah Pinto, maka setiap 15 hari sekali PPL mengadakan pertemuan dengan Kelompok Tani (Ketua dan seluruh anggotanya) sekaligus dilakukan evaluasi pelaksanaan program oleh PPL. Kelompok tani di Meunasah Pinto terdiri dari seorang ketua, sekretaris dan bendahara dengan jumlah anggota sebanyak 25 orang.

Di Meunasah Pinto juga terdapat program Lumbung Pangan, yaitu bantuan pemerintah berupa pembangunan gedung yang berfungsi sebagai lumbung tempat menyimpan beras sebagai persediaan untuk membantu petani ketika musim paceklik. Untuk itu, selain bantuan gedung, pemerintah juga memberikan modal sebesar Rp 40 juta rupiah yang diberikan dalam 2 tahap selama 2 tahun sebagai modal untuk membeli gabah petani pada saat musim panen sehingga diharapkan petani dapat menjual gabahnya dengan harga yang sesuai dengan Harga Eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah. Gabah yang dibeli dari petani kemudian disimpan di lumbung untuk dimanfaatkan sebagai pinjaman kepada petani yang membutuhkan di saat musim paceklik tiba. Dengan luasan sawah yang kecil (rata-rata 0.2 Ha, sementara luasan yang ideal adalah > 0.6 ha) maka hasil panen padi yang diperoleh seringkali tidak mencukupi untuk bisa bertahan memenuhi konsumsi pangan pokok keluarga sampai musim panen berikutnya.

Dengan demikian lumbung pangan diharapkan dapat membantu mengatasi hal itu. Pinjaman diberikan dalam bentuk padi dan dikembalikan dalam bentuk yang sama dengan jumlah yang sama pada saat petani panen.

Hal itu merupakan salah satu program untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat petani yang dibuat oleh Departemen Pertanian RI. Namun permasalahan yang terjadi dalam implementasi program ini di masyarakat adalah petani umumnya tidak menjual padinya pada saat panen tetapi sebagian hasil panennya (1/3 bagian atau sekitar 30%) diserahkan kepada pemilik tanah (karena umumnya petani melakukan sistem budidaya dengan cara bagi hasil dengan perbandingan 1:3), sebagian lagi untuk membayar hutang modal usahatani (sewa traktor, pupuk dan obat-obatan) yang kisarannya juga sekitar 1/3 dari hasil, sehingga sisanya yang hanya tinggal 1/3 bagian dibawa pulang ke rumah untuk konsumsi pangan keluarga.

### 3. Produktivitas Gabah Pasca Intervensi Pemerintah

Dengan masuknya beragam intervensi teknologi pertanian ke Meunasah Pinto, maka produksi pertanian menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama karena petani bisa melakukan tanam dan panen sebanyak 2 kali dalam setahun. Dalam satu kali panen, untuk luasan 1 *rante* ( $\pm 400$  m<sup>2</sup>), petani bisa memperoleh hasil panen padi rata-rata sebanyak 1.5 *gunca* atau setara dengan 300 kg karena 1 *gunca* = 200 kg. Jadi pada sawah 1 ha (25 *rante*), maka dalam kondisi normal rata-rata petani bisa memperoleh hasil panen sebanyak 7.5 ton gabah padi.

Namun ada konsekuensi lain yang harus ditanggung petani setelah berkembangnya teknologi pertanian, yaitu meningkatkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan petani untuk memperoleh hasil sawah yang memadai. Jika dahulu pembajakan tanah dilakukan dengan menggunakan kerbau yang umumnya dimiliki oleh masing-masing petani maka sekarang petani harus membayar biaya sewa traktor untuk membajak sawah mereka. Perkembangan teknologi benih menuntut kebutuhan penggunaan pupuk kimia yang beranekaragam dan mengundang berkembangnya aneka jenis hama sehingga membutuhkan aneka bentuk obat-obatan untuk mencegah dan membasminya. Berubahnya sistem tanam dan panen serta merontokkan padi (*cemelho*) dari sistem gotong royong kepada sistem upah juga merupakan salah satu konsekuensi meningkatkan biaya budidaya padi sawah yang harus ditanggung petani. Demikian juga dengan semakin berkembangnya mesin penggiling gabah menjadi beras yang menggantikan peran 'lesung', menjadi tambahan komponen biaya yang harus ditanggung oleh petani sekarang.

Jadi, untuk dapat mengolah sawah, maka petani harus memiliki cukup modal untuk dapat membiayai seluruh kegiatan usahatani yang semuanya harus dibayar dengan uang. Jika petani tidak cukup memiliki ketersediaan dana di awal musim tanam, maka umumnya mereka meminjam pada toko sarana produksi pertanian atau pada *toke* dan membayarnya pada saat panen dengan konsekuensi umumnya mereka harus menjual padinya ke *toke* dan menerima harga padi sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh *toke* yang cenderung lebih rendah dibandingkan HET (Harga Eceran Tertinggi) gabah yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal pembelian pupuk, jika petani membeli dengan cara tunai, maka harganya sesuai dengan ketetapan pemerintah, yaitu Rp 90.000,- untuk satu sak pupuk urea. Namun jika petani membayar setelah panen, maka harga yang harus dibayar lebih mahal, yaitu mencapai Rp

110.000,- per sak (15 kg).

Sektor pertanian sebagai sektor primer mampu memberikan kontribusi secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rumah tangga tani. Hal ini tergantung pada tingkat pendapatan usahatani dan surplus yang dihasilkan oleh sektor itu sendiri. Dengan demikian, tingkat pendapatan usahatani, disamping merupakan penentu utama kesejahteraan rumah tangga tani, juga sebagai salah satu faktor penting (Sari, 2014).

Kemiskinan petani disebabkan oleh banyak hal, seperti kebijakan pemerintah yang tidak tepat, dalam hal pendekatan dan bentuk program yang tidak mengakomodir kepentingan rumahtangga miskin. Ada kecenderungan program pemerintah hanya berorientasi proyek dan ada penyimpangan dalam implementasinya. Keadaan lain yang mempersulit terakomodirnya rumahtangga miskin dalam program pemerintah adalah karena program-program tersebut hanya dinikmati oleh lapisan elit desa dan kerabatnya yang secara ekonomi relatif mampu (Masithoh, 2009).

Keberhasilan pembangunan memerlukan partisipasi aktif seluruh kelompok masyarakat dengan asumsi bahwa masyarakat pedesaan memiliki lebih banyak kontribusi terhadap proses pembangunan daripada hanya uang atau tenaga kerja mereka. Mereka punya ide, keterampilan manajemen, wawasan teknis, dan kemampuan organisasi yang dibutuhkan untuk pembangunan. Mereka dianggap sebagai mitra lebih dari kelompok sasaran "penerima manfaat" atau (lebih buruk) "Uphoff).

Sebuah komunitas adalah sekelompok orang yang berbagi

bersama dalam suatu lingkungan fisik, sumber daya, dan layanan, serta risiko dan ancaman. Hal itu suatu kesatuan kolektif yang memiliki batas-batas (geografis), faktor internal dan eksternal serta nasib bersama. Oleh karena itu, masyarakat adalah sistem fisik dan sosial yang kompleks terdiri dari banyak sub-sistem. Walaupun merupakan sebuah sistem yang memiliki ciri khas tersendiri, tetapi tetap terdapat interaksi antara komunitas di suatu wilayah dengan pihak lain di luar komunitas, seperti dengan pemerintah, perusahaan dan pihak-pihak terkait lainnya. Masyarakat yang memiliki sumberdaya yang dan kapasitas adaptif yang tinggi maka menunjukkan bahwa masyarakat itu memiliki resiliensi komunitas yang tangguh.

Namun, masyarakat yang memiliki sumber daya yang kurang dan juga kapasitas adaptif yang rendah, maka mereka akan kurang resilien. Jadi, sebuah komunitas yang kurang menguasai sumber daya, maka harus berkonsentrasi pada upaya membangun kapasitas adaptasinya sehingga dapat melakukan fungsi yang diinginkan (Longstaff, 2010).

Keberadaan kelembagaan petani bagi petani sudah menjadi keniscayaan untuk memperbaiki taraf hidup, harkat dan martabatnya. Kelembagaan petani harus ditempatkan sebagai sarana untuk mewujudkan harapan, keinginan, dan pemenuhan kebutuhan petani. Kelembagaan petani yang efektif diharapkan mampu memberi kontribusi yang nyata dalam meningkatkan kemandirian dan martabat petani (Anantanyu, 2011). Upaya untuk menuju pada peningkatan kesejahteraan petani secara operasional dilakukan melalui pemberdayaan penyuluhan, pendampingan, penjaminan usaha, perlindungan harga gabah, kebijakan proteksi dan promosi. Beberapa upaya tersebut

Tabel 2. Analisis Biaya Usaha Tani Padi Sawah di Gampoeng Meunasah Pinto Tahun 2016 (Per Ha)

No	Uraian	Jumlah (Per hektar)	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah/Ha (Rp)
<b>A. PENDAPATAN</b>				
1.	Penjualan			
	Penerimaan Total	7500 kg gabah	Rp 4.500,-/kg	Rp 33.750.000,-
<b>B. PENGELUARAN</b>				
1.	Bajak (Traktor)	10.000 m <sup>2</sup>	Rp 50-60,-/m <sup>2</sup>	Rp 500.000,-/s/d Rp 600.000,-
2.	Pemupukan Tanah			
3.	Peugleh Blang	25 HOK	Rp. 30.000,/orang	Rp 750.000,-
4.	Pestisida 'keong'	18 tangki 13 bungkus obat	Upah semprot Rp 10.000,-/tangki Harga obat Rp 15.000,- pr bungkus	Rp 375.000,-
5.	Semai benih			Dikerjakan sendiri
6.	Tanam	42 HOK	Rp 30.000,/orang	Rp 1.260.000,-
7.	Pemupukan (setelah 7 hari tanam)	15 sak pupuk campur 6 kg pupuk mutiara	Rp 180.000,-/sak pupuk campur Rp 10.000,-/kg pupuk mutiara	Rp 2.760.000,-
8.	Pupuk semprot	6 sak pupuk Upah semprot 18 tangki	Rp 150.000,-/sak pupuk Upah semprot Rp 10.000,-/tangki	Rp 1.080.000,-
9.	Meumpo (pegleh padi)	25 HOK	Rp 30.000,/HOK	Rp 750.000,-
10.	Keumekoh (potong padi)	36 HOK	Rp 30.000,/orang	Rp 1.080.000,-
11.	Peutengoh (meublet)	18 HOK	Rp 100.000,/orang	Rp 1.800.000,-
12.	Rontok	Untuk setiap 16 kaleng padi biaya 1 kaleng 1 kaleng = 11 kg gabah Jadi biaya = 6.25%	Rp 4.500,-/kg	Rp 2.025.000,-
13	Bawa pulang padi ke rumah	12 becak	Rp 30.000,-/becak	Rp 360.000,-

memang relative sangat diperlukan namun factor kendala seperti disebutkan terdahulu perlu mendapatkan perhatian yang cermat hingga ditingkat daerah. Hal tersebut dapat dimengerti mengingat sebagian besar petani di Indonesia untuk komoditas beras masih tergolong petani subsisten dalam artian berperan sebagai produsen sekaligus konsumen beras. Dengan demikian maka jumlah beras yang dijual ke pasar akan sangat bergantung pada surplus konsumsi rumah tangga dan harga beras serta harga barang lain yang diperlukan petani dari industri lain (Darwanto, 2005).

Bagan diatas memperlihatkan bahwa modernisasi pertanian disatu sisi berdampak konstruktif dalam hal peningkatan produktivitas pertanian di Meunasah Pinto, namun disisi yang lain hilangnya ikatan komunalitas dalam pola hubungan produksi mendorong biaya produksi menjadi besar dan mahal. Berubahnya, pola produksi yang bersifat gotong royong (*meu urup*) mulai dari bajak sawah, tanam benih, potong dan perontokan padi menjadi pola produksi serba uang pasca modernisasi sistem pertanian di Meunasah Pinto mengkonstruksikan realitas baru bahwa produktivitas yang tinggi tidak memberi jaminan terhadap meningkatnya pendapatan yang diperoleh oleh petani.

Agar petani produktif, maka sangat dibutuhkan pemenuhan sarana prasarana yang kurang di daerah pedesaan. Ini adalah hasil dari puluhan tahun pengabaian sektor pertanian oleh Negara. Bentuk baru inovasi kelembagaan dikembangkan untuk memberikan tanggapan terhadap berbagai kendala yang dihadapi produsen kecil di daerah pedesaan.

Organisasi inovatif dan pengaturan kelembagaan ini dapat memberi produsen kecil berbagai layanan termasuk memperbaiki akses pasar dan memperkuat kekuatan negosiasi produsen kecil, meningkatkan akses dan pengelolaan sumber daya alam dan memperbaiki akses terhadap informasi dan pengetahuan. Mereka juga merupakan cara yang efektif untuk memberdayakan produsen kecil dengan membantu mereka membangun kapasitas mereka untuk merumuskan dan mengungkapkan kebutuhan dan keprihatinan mereka di dalam organisasi mereka dan berhadapan dengan aktor ekonomi dan pembuat kebijakan yang berpengaruh. (Herbel, 2012).

## KESIMPULAN DAN SARAN

Meskipun pembangunan pertanian dilakukan terus menerus, namun isu yang berkaitan dengan kemiskinan di pedesaan, terbatasnya akses lahan dan prasarana pertanian, serta pendapatan yang tidak memadai masih tetap menjadi isu utama pembangunan pertanian dan pedesaan. Di agroekosistem lahan sawah, tingkat kemiskinan berhubungan dengan musim paceklik (*gestation period* masa tanam padi). Hubungan antara kemiskinan dengan kepemilikan lahan sawah mengindikasikan meningkatnya kemiskinan dengan makin sempitnya rata-rata pemilikan lahan (Karmana, 2012).

Studi terhadap modernisasi pola produksi dan peningkatan produktivitas pertanian di *gampoeng* (desa) Meunasah Pinto, Aceh Utara ini menemukan bahwa Produktivitas pertanian yang melimpah sebagai konsekuensi dari keberhasilan modernisasi sistem, pola produksi dan penggunaan bibit unggul tidak secara otomatis dapat merubah tingkat kesejahteraan masyarakat petani. Karena, perubahan sistem dan pola produksi ini juga diikuti dengan perubahan pola hubungan produksi.

Dalam masyarakat *gampoeng* (desa) pola produksi pertanian pada dasarnya bersifat komunal dan resiprositas sehingga hubungan-hubungan sosial yang terjalin bersifat kolektif dan

mekanik sehingga biaya produksi murah, sebab dalam banyak hal bersifat gratis karena dilakukan secara gotong royong. Segregasi sosialpun tidak kentara dalam kehidupan sosial masyarakat *gampoeng* (desa).

Hal ini sejalan dengan nilai kebersamaan disebut *mapalus* pada masyarakat Desa Rap Rap. Budaya *mapalus* ini mengandung juga suatu prinsip resiprositas, yaitu suatu pola kehidupan untuk adanya ikatan dan keharusan sosial dalam masyarakatnya agar saling membantu secara timbal balik. Sistem ini sudah berkembang baik dan telah menjadi satu modal sosial yang tetap dijaga masyarakat desa. Dalam kondisi sulit pun mereka masih dapat saling membantu dan melindungi (Fatimah, 2013). Pembahasan tentang resiprositas dan redistribusi pada masyarakat pedesaan juga menjadi kajian Leijonhufvud (2007). Begitu pula dengan hasil penelitian Fadjar (2008) tentang berlangsungnya transformasi sistem produksi pertanian mempercepat transformasi struktur agraria.

Namun demikian, masih kuatnya hubungan sosial produksi yang berpijak pada ikatan moral tradisional (terutama ikatan kekerabatan, pola pewarisan, dan solidaritas lokal untuk menjaga kebutuhan minimum warga se-komunitas) turut mempertahankan penerapan pola “penguasaan sementara”, khususnya melalui pola “bagi hasil.”. Demikian pula yang terjadi di Meunasah Pinto, masih adanya ikatan solidaritas dan masih kuatnya hubungan kekerabatan antara warga masyarakat tidak sepenuhnya menghapus pola-pola hubungan produksi yang ada. Walaupun sistem upah tenaga kerja pertanian berkembang, namun pola bagi hasil juga masih bertahan.

Pada pertanian marginal, dan di bidang pertanian pada umumnya, keberlanjutannya sebagian besar dijamin oleh berbagai strategi bertahan hidup yang saling terkait erat dan melekat dalam struktur rumah tangga dari tipe-tipe keluarga yang khas. Hasil studi sosio-ekonomi yang dilakukan di kalangan petani Belgia, yang secara khusus berfokus pada peluang yang ditawarkan oleh berbagai bentuk diversifikasi yang berbeda, menunjukkan kemungkinan pentingnya kegiatan baru dalam mencapai kelangsungan hidup pada banyak petani. Penerapan strategi ini sangat ditentukan oleh ketersediaan modal di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pekerjaan di luar pertanian seringkali merupakan strategi yang paling mudah diakses, tidak hanya untuk kelangsungan hidup rumah tangga, tetapi juga untuk menambah pendapatan yang diperlukan untuk mempertahankan kegiatan pertanian (Meert, 2005).

Untuk meningkatkan kesejahteraan petani diperlukan kebijakan untuk meningkatkan pendapatan melalui berbagai aspek yang menunjang peningkatan sektor pertanian dan non pertanian. Di samping itu diperlukan kebijakan harga komoditas yang layak diterima petani dengan pengembangan usaha pertanian yang berkelanjutan, serta didorong oleh iklim usaha di luar pertanian yang lebih kondusif, sehingga dapat diperoleh manfaat bagi rumah tangga petani sebagai penyedia tenaga kerja, aset lahan dan modal yang terbatas (Sugiarto, 2008).

Jika tidak, maka tidak artinya modernisasi sistem pertanian dan pelbagai kebijakan turunannya bagi kesejahteraan petani. sebab realitasnya, tatkala modernisasi sistem dan pola produksi pertanian dilakukan, maka pola hubungan produksi pun ikut berubah. Modernisasi yang diikuti dengan rasionalisasi dalam pola hubungan produksi menyebabkan pola hubungan produksi tradisional yang bersifat komunal dan resiprositas berubah menjadi serba upah dan individual. Akibatnya, biaya produksi mahal. Hal ini menyebabkan produktivitas yang tinggi dari hasil modernisasi sistem pertanian tidak berhasil secara signifikan



mengubah tingkat kesejahteraan. Bahkan, modernisasi ini berkontribusi langsung terhadap tumbuh suburnya segregasi sosial dalam hubungan sosial masyarakat *gampoeng* (desa).

### Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Riset Teknologi Dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia dan Rektor Universitas Malikussaleh yang telah memberikan fasilitas pendanaan penelitian ini melalui skema Fundamental pada tahun anggaran 2016 sehingga peneliti memiliki kesempatan untuk menyusun artikel jurnal ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada aparaturnya dan masyarakat Meunasah Pinto Kabupaten Aceh Utara, serta ketua LPPM Universitas Malikussaleh dan jajarannya yang telah memfasilitasi seminar dan diskusi kritis terhadap hasil penelitian ini sehingga dapat memperoleh pelbagai masukan konstruktif dalam penyempurnaan riset ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anantanyu, Sapja. 2011. Kelembagaan petani: perandanya terhadap pengembangan kapasitasnya. *SEPA: Vol. 7 No. 2 Pebruari 2011: 102-109*
- Asmara, Rosihan dan Nuhfil Hanani. 2016. Tingkat kesejahteraan petani kabupaten Jombang: Pendekatan Nilai Tukar Petani. Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Pertanian.
- Benda. Harry. J. 1985. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit, Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*. Pustaka Jaya. Jakarta.
- BPS Aceh. 2017. Luas dan Produksi Tanaman Padi (Sawah dan Ladang) Menurut Kabupaten/Kota 2013.
- Darwanto, Dwidjono H. 2005. Ketahanan Pangan Berbasis Produksi dan Kesejahteraan Petani. *Ilmu Pertanian* Vol. 12 No. 2, 2005 : 152-164
- Data Monografi *Gampoeng* Meunasah Pinto, 2015.
- Dharmawan, Arya H and Winfried Manig. 2000. *Livelihood Strategies and Rural Changes in Indonesia: Studies on Small Farm Communities*. Deutscher Tropentag 2000 in Hohenheim.
- Dharmawan, Arya H. 2007. Sistem Penghidupan dan Nafkah Pedesaan: Pandangan Sosiologi Nafkah (*Livelihood Sociology*) Mazhab Barat dan Mazhab Bogor. *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia*. Agustus 2007, p. 169-192.
- Ellis, Frank. 2000. *Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries*. Oxford University Press, Oxford, pp. xiv+273.
- Fadjar, U, dkk. 2008. Transformasi Sistem Produksi Pertanian dan Struktur Agraria serta Implikasinya terhadap Diferensiasi Sosial dalam Komunitas Petani: Studi Kasus pada Empat Komunitas Petani Kakao di Provinsi Sulawesi Tengah dan Nangroe Aceh Darussalam). *Jurnal Agro Ekonomi*, Volume 26 No. 2, Oktober 2008 : 209 - 233.
- Faisal, Sanafiah. 2003. *Filosofi dan Akar Tradisi Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- 2003. *Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*. Rajawali. Jakarta.
- Fatimah, Nyayu. 2013. Strategi bertahan hidup masyarakat Desa Rap Rap. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Volume 15 No. 2 Tahun 2013.
- Geertz, Clifford, 1963. *Agricultural Involvement*. USA: Chicago
- 1981. *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Haryanto, Sindung. 2012. *Spektrum Teori Sosial: Dari Klasik Hingga Postmodern*. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta.
- Herbel, Denis., dkk. 2012. *Good Practices in Building Innovative Rural Institutions to Increase Food Security*. FAO.
- Hernanto, Fadholi. 1989. *Ilmu Usaha Tani*. Jakarta : Penebar Swadaya.
- ISMUHA. 1983. *Adat dan Agama di Aceh*. Banda Aceh: Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Syiah Kuala
- Johnson, Doyle Paul. 1994. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Gramedia. Jakarta.
- Karmana, Maman H., dkk. 2012. Tantangan Pembangunan Pertanian : Kemiskinan Pada Berbagai Ekosistem. Prosiding PSE Litbang Pertanian.
- Kementerian PPN/BAPPENAS. 2014. Analisis Rumah Tangga, Lahan, dan Usaha Pertanian di Indonesia: Sensus Pertanian 2013. Direktorat Pangan dan Pertanian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Leijonhufvud, Axel. 2007. The Individual, the Market and the Division of Labor in Society. *Capitalism and Society. Volume 2, Issue 2, Article 3*.
- Longstaff, et.al. 2010. Building Resilient Communities: A Preliminary Framework for Assessment. *Homeland Security Affairs*, Volume VI, No. 3.
- Lumbanraja, Mardiana. Pengaruh kredit pertanian terhadap kesejahteraan petani kelapa sawit di Kabupaten Labuhan Batu Utara. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol. 1 No. 10
- Mardiyaningsih, Dyah Ita, dkk. 2010. Dinamika Sistem Penghidupan Masyarakat Tani Tradisional dan Modern di Jawa Barat. *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia*. April 2010, hlm. 115-145.
- Masithoh, Siti., dkk. 2009. Dimensi Kepentingan dalam Pengembangan Kelembagaan Pangan Lokal : Studi Kasus Program Aksi Mandiri Pangan di Desa Jambakan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah. *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia*. Agustus 2007, p. 259-272.
- Meert, H., et. Al. 2005. Farm Household Survival Strategies and Diversification on Marginal Farms. *Journal of Rural Studies* 21 (2005) 81 - 97.
- Miles, B, Matthew dan A. Michael Haberman. 1992. *Qualitative Data Analysis*. UI Press. Jakarta
- Moleong, Lexy. J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya. Bandung.
- Munthe, Hadriana Marhaeni. 2007. Modernisasi dan Perubahan Sosial Masyarakat dalam Pembangunan Pertanian: Suatu Tinjauan Sosiologis. *Jurnal Harmoni Sosial*, September 2007, Volume II, No. 1
- Nirzalin. 2012. *Ulama dan Politik di Aceh. Menelaah Hubungan Kekuasaan Teungku Dayah dan Negara*. Maghza Pustaka. Yogyakarta
- Patton, Quin Michael. 1987. *How to Use Qualitative Methods Evaluation*. Sage Publications. California.
- Rangkuti, P.A. 2010. Peran Komunikasi dalam Modernisasi Pertanian Berbasis Koperasi. *Jurnal Komunikasi Pembangunan* Februari 2010, Vol. 08, No. 1
- Ritzer, George. 2014. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sari, Dian Komala, dkk. 2014. Analisis Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Jagung di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. *JIIA*, Volume 2, no. 1, Januari 2014.
- Salman, Darmawan. 2012. *Sosiologi Desa : Revolusi Senyap dan Tarian Kompleksitas*. Makasar : Inninawa.
- Scoones, Ian. 2009. Livelihood Perspectives and Rural Development. <http://dx.doi.org/10.1080/03066150902820503>
- Sugarto. 2008. Analisa Tingkat Kesejahteraan Petani Menurut Pola Pendapatan dan Pengeluaran di Perdesaan. Makalah Seminar Nasional Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaan : Tantangan dan Peluang bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani. Bogor, 19 Nopember 2008.

Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian,  
Departemen Pertanian.

- Sukirno. 2013. *Membangun Pertanian dengan Pemberdayaan Masyarakat Tani: Terobosan Menanggulangi Kemiskinan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Uphoff, Norman. *Local Institutions and Participation for Sustainable Development*. International Institute for Environment and Development (iied): Sustainable Agriculture and Rural Livelihood Programme. Gatekeeper Series No.31.
- Vias, Alexander C. and Peter B. Nelson. 2006. Changing livelihoods in rural America dalam W.A. Kandel & D.L. Brown (eds.), *Population Change and Rural Society*, 75–102.
- Wolf, Eric R. 1985. *Petani : Suatu Tinjauan Antropologis*. Jakarta: CV Rajawali.
- Widodo, Slamet. 2009. *Proses Transformasi Pertanian dan Perubahan Sosial Pada Masyarakat Samin di Bojonegoro*. *Embryo Vol. 6 No 1*, Juni 2009
- , 2011. *Strategi nafkah berkelanjutan bagi rumah tangga miskin di daerah pesisir*. *Makara, Sosial Humaniora*. Vol. 15, NO. 1, 10-20.
- Zainuddin. 1980. *Bunga Rampai Tentang Aceh*. Jakarta: Bharta Karya Aksara